

Stabilisasi ekonomi di era revolusi : Studi atas kebijakan fiskal

Abdullah Shofa

Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang²
e-mail: Shofa1529@gmail.com

Kata Kunci:

Era revolusi, kebijakan fiskal, reformasi perpajakan, inflasi, perang kemerdekaan

Keywords:

Revolution era, fiscal policy, tax reform, inflation

ABSTRAK

Artikel ini membahas kebijakan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1949 dalam usaha untuk menstabilkan perekonomian setelah merdeka. Dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat perang kemerdekaan dan inflasi yang tinggi, pemerintah menerapkan kebijakan anggaran seimbang untuk mengurangi kekurangan anggaran dan menekan inflasi. Pendapatan negara, terutama dari pajak, ditingkatkan melalui perubahan dalam sistem perpajakan untuk membiayai kebutuhan mendesak, termasuk penstabilan harga barang pokok. Kebijakan ini

menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang cermat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, kebijakan anggaran tahun 1949 menjadi langkah penting dalam sejarah pengelolaan ekonomi Indonesia. Sumber daya yang terbatas bisa diperbaiki melalui pengelolaan keuangan yang strategis, sehingga menciptakan dasar untuk pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang

ABSTRACT

This article discusses the budget policy implemented by the Indonesian government in 1949 in an effort to stabilize the economy after independence. In difficult economic conditions due to the war of independence and high inflation, the government implemented a balanced budget policy to reduce budget deficits and suppress inflation. State revenues, especially taxes, were increased through changes in the taxation system to save on urgent needs, including stabilizing the prices of basic goods. This policy demonstrated the importance of careful budget planning in maintaining economic stability amidst the crisis. Despite facing various obstacles, the 1949 budget policy was an important step in the history of Indonesian economic management. Limited resources can be improved through strategic financial management, thereby creating the basis for more sustainable economic development in the years to come

Pendahuluan

Pada era revolusi sekitar tahun 1945-1949 merupakan masa yang penuh dengan tantangan yang menguji segenap kemampuan bangsa dalam bertahan dan membangun fondasi pasca kemerdekaan. Terlaksanalah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia mendapatkan tekanan dari Belanda yang masih berambisi dalam menduduki kembali negara Indonesia, disertai dengan adanya konflik internal yang dialami oleh bangsa Indonesia yang sangat menguji stabilitas ekonomi, politik, sosial. Konteks ini menjadikan prioritas utama bagi pemerintah pada saat itu, akan tetapi dengan adanya situasi yang bergejolak membuat pencapaian tersebut juga sangat kompleks.

Hal ini memberikan dampak yang diberikan oleh kolonialisme dan dampak dari perang dunia ke-dua sangat panjang bahkan hingga saat ini, yang dimana infrastruktur hancur, minimnya kendali pada sumber daya alam, dan akses terhadap pasar global yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjadi rintangan utama bagi Bangsa Indonesia. Pada lain sisi, Indonesia yang baru merdeka dihadapkan dengan tantangan fiskal yang besar, seperti tingginya angka inflasi, keterbatasan akan anggaran, serta tekanan untuk membiayai militer dalam melawan agresi Belanda II. Di tahun 1949, upaya dalam mewujudkan stabilisasi ekonomi semakin mendesak situasi politik menuju pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar (Cahyasari, 2018).

Kebijakan fiskal menjadi prioritas utama dalam menghadapi dan memperbaiki tantangan ekonomi. Pada saat itu, pemerintahan mulai memikirkan kebijakan fiskal yang mampu menghadapi angka inflasi dan ketersediaan dana dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih rapi atau terstruktur, mengolah dana yang lebih bijak, serta memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dalam menopang stabilitas perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dalam pengimplementasinya tidak berjalan dengan lancar karena dihadapkan oleh berbagai faktor seperti eksternal maupun internal. Pada tingkat eksternal, tekanan yang diberikan oleh Belanda dan ketidakpastian dalam hubungan diplomatik Internasional dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengakses bantuan ekonomi dan teknologi dari luar negeri. Selain daripada itu, pada tingkat internal terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya literatur ekonomi masyarakat, kurangnya kapasitas dalam hal administrasi, serta perbedaan dalam segi pandangan oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadikan tantangan yang besar. Dan selain itu tantangan yang dihadapi Indonesia seperti perbedaan mata uang yang masih beredar, yang menyulitkan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian.

Ditahun 1949, pemerintah mulai merancang arah perekonomian Indonesia dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan membuat konsolidasi kebijakan fiskal seperti menetapkan anggaran belanja yang lebih nyata, serta mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak produktif. Upaya ini mencakup penguatan penerimaan pajak serta pengelolaan terhadap sumber daya alam yang lebih terencana. Akan tetapi, tercapainya upaya ini sangat bergantung pada stabilitas politik dan dukungan dari Masyarakat (Cahyasari, 2018). Studi mengenai kebijakan fiskal di tahun 1949 sangat penting untuk dilakukan karena untuk memahami bagaimana pemerintah Indonesia menyusun strategi perekonomian di tengah pergolakan politik menuju kedaulatan secara penuh. Di masa ini, menjadikan momen penting dalam sejarah perekonomian Indonesia, karena keuletan keputusan-keputusan yang diambil dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka yang panjang.

Analisis ini juga masih relevan dalam mengkaji pelajaran dari kejadian di masa lalu, terkhusus jika berhadapan dengan krisis ekonomi serta politik yang sangat kompleks. Dengan menelaah serta memahami tentang kebijakan fiskal di tahun 1949 dirancang dan diimplementasikannya. Dengan hal ini, kita dapat menambah wawasan terkait dengan perancangan kebijakan fiskal yang lebih bijak ataupun efektif dalam menghadapi masalah yang serupa baik masa kini maupun masa yang akan datang. Studi ini akan mendalami serta menganalisis terkait dengan berbagai kebijakan fiskal yang digunakan, tantangan dan hambatan yang di hadapi, serta dampak yang diberikan terhadap upaya stabilitas perekonomian di akhir masa revolusi. Konteks sejarah ini dapat memberikan

kerangka dalam upaya mengeksplorasi kegunaan kebijakan fiskal sebagai fondasi pertama dalam menjaga stabilitas perekonomian, dan mempertahankan legitimasi Indonesia, serta menciptakan kerangka perekonomian bagi masa depan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara (Siswajanthi et al., 2024). Pendapatan ini digunakan oleh pemerintah dalam hal pembiayaan dalam pengeluaran yang ditimbulkan oleh kegiatan dalam pemerintahan. Kebijakan fiskal termasuk pada bagian ekonomi makro yang digunakan untuk mengejar target pembangunan ekonomi. Kegunaan kebijakan fiskal jika dilihat secara umum memiliki tiga fungsi yaitu, stabilisasi dalam ekonomi, penetapan dalam target aturan, dan memiliki fungsi untuk mendistribusikan subsidi serta pendapatan. Fungsi dari penetapan target aturan memiliki tujuan dalam segi pembangunan ekonomi. Dan fungsi dari mendistribusikan subsidi dan pendapatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan fungsi dari stabilisasi memiliki makna jikalau aturan dari pemerintah menjadi hal penting dalam memelihara dan mengupayakan landasan dalam perekonomian (Cahyasari, 2018).

Rancangan kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memberi arah terhadap perekonomian disuatu negara melewati pengeluaran dan pendapatan yang memiliki bentuk pajak pemerintah. Jika dilihat, kebijakan fiskal tidak mirip dengan kebijakan moneter, secara garis besar kebijakan moneter menekankan kestabilan perekonomian dengan cara menjaga tingkat suku bunga dan menjaga jumlah uang yang beredar. Jika melihat instrumen dari kebijakan fiskal maka terdapat pengeluaran dan pendapatan atau pajak. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah memiliki tujuan dalam memengaruhi jalannya aktivitas perekonomian, atau dengan kata lain pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal dapat mengarahkan jalannya aktivitas perekonomian ke arah yang diinginkan. Dengan melewati kebijakan fiskal pemerintah memiliki wewenang dalam memengaruhi angka pendapatan nasional, lapangan pekerjaan, investasi, serta bisa memengaruhi distribusi dalam penghasilan negara (Siswajanthi et al., 2024).

Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul *The General theory of Empploiment* pada tahun 1936. Keynes atau Keynesian muncul sebagai reaksi terhadap depresi besar dalam perekonomian Amerika pada perkiraan tahun 1930 -an serta kritiknya terhadap teori-teori klasik yang menyatakan jika pemberlanjnaan pemerintahan dapat mengakibatkan turunnya pemberlanjnaan pihak swasta karena teori-teori ini percaya dengan kondisi yang disebut dengan full employment atau kondisi ekonomi negara. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam teori Keynesian, dalam teori Keynesian berpendapat jika untuk meraih perekonomian yang stabil, harus terdapat intervensi oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan awal mula terbentuknya kebijakan fiskal (Siswajanthi et al., 2024).

Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan pertama kali dibentuk pada tahun 1983 dibawa pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Soemitro pajak adalah sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat terhadap kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak adanya timbal balik langsung (Putri & Najicha, 2021). Sedangkan reformasi dalam KMBBI merupakan perubahan secara cepat dan drastis dalam perbaikan suatu keadaan masyarakat atau negara. Reformasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem perpajakan dan terjadi secara cepat serta menyeluruh yang mencakup perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan peraturan perpajakan, dan peningkatan basis-basis perpajakan.

Latarbelakang dalam pembentukan reformasi perpajakan melalui peraturan undang-undang pajak yang berlaku pada masa itu ialah sebagai peninggalan masa kolonial Belanda serta tujuan yang dirancang pada masa itu sudah tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang telah mencapai kemerdekaan dan berkedaulatan sejak terlaksananya Proklamasi 1945. Di masa kolonial pemungutan pajak memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sang penjajah dan kepentingan pemerintahan masa kolonial. Sedangkan didalam status kemerdekaan, pemungutan pajak dilandasi Pancasila serta Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Selain tidak selaras dengan Bangsa Indonesia yang sudah merdeka serta berdaulat, peninggalan pemungutan pajak oleh kolonial tidak memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, kepastian dalam hukum, serta pertumbuhan ekonomi.

Penerapan Kebijakan Fiskal di Era Revolusi 1949 serta tantangan yang di hadapi

Ditahun 1949, Indonesia berada pada kondisi perekonomian yang sangat sulit yang diakibatkan oleh peperangan dalam meraih kemerdekaan, ketidakstabilan pada aspek politik, serta menanggung kerusakan-kerusakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia dihadapkan serta harus memperbaiki perekonomian dengan sangat bijak dan efisien, serta kebijakan fiskal yang menjadi tonggak penuntun dalam meraih stabilitas perekonomian. Penerapan kebijakan fiskal pada masa era revolusi digagas dengan tujuan dalam mengurangi defisit anggaran, menurunkan angka inflasi, serta memastikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat dasar, terutama barang-barang pokok yang dapat dikonsumsi oleh Masyarakat (Siswajanthi et al., 2024).

Adapun kebijakan fiskal yang digunakan pada era revolusi ialah *Balanced Budget* atau kebijakan fiskal yang berimbang, tujuan dari penggunaan fiskal yang berimbang ialah untuk mengurangi angka defisit penganggaran yang diakibatkan oleh pengeluaran negara untuk memenuhi keperluan-keperluan perang serta dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Pemerintahan pada saat itu tengah menghadapi tekanan yang sangat besar dalam menjaga kestabilan dalam aspek politik serta perekonomian dengan menghindari adanya inflasi yang jauh lebih parah (Siswajanthi et al., 2024). Adapun dengan hal ini, kebijakan yang seimbang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan angka pemasukan serta pengeluaran nasional, dengan cara menghindarkan pembiayaan melewati utang-utang yang tergolong berlebihan.

Dengan adanya kebijakan fiskal yang berimbang, menjadi salahsatu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan pada saat itu dengan mengoptimalkan pendapatan pajak yang melewati reformasi perpajakan yang sedang dilakukan, serta pemerintah

menaikkan angka pajak serta memasifkan aspek administrasi pajak yang bertujuan meningkatkan angka penerimaan negara pada masanya. Hal ini menjadi prioritas pemerintah karena situasi yang mengalami krisis ekonomi dan terselenggarakannya peperangan, maka dari itu, pendapatan negara harus bisa mencukupi kebutuhan – kebutuhan pembelanjaan negara, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak seperti pengelolaan dalam pemerintah dan penggunaan militer. Dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak di era revolusi, pemerintahan Indonesia memprioritaskan pajak sebagai sumber pemasukan utama bagi negara, selain mana'ikkan angka pajak yang berlaku pada masa itu, pemerintahan juga mengambil sikap untuk memasifkan sistem-sistem administrasi pajak yang masih tergolong lemah. Salahsatunya ialah dengan melakukan pajak yang lebih realistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan(Cahyasari, 2018).

Pada era revolusi sistem pajak yang diimplementasikan masih mengandung struktur pajak kolonial Belanda, walaupun terdapat beberapa perubahan yang signifikan. Adapaun pengenalan terhadap pajak pendapatan yang diimplementasikan di tahun 1949 adalah salahsatu upaya yang penting dalam memperbaiki dan menyempurnakan penerimaan nasional. Pajak yang berlaku ditujukan untuk setiap individu dan badan usaha yang aktif yang bertujuan untuk menaikkan angka pendapatan negara yang kelak digunakan untuk kebutuhan pembelanjaan negara yang amat terbatas. Selain dari pada itu, kegunaan pajak tidak hanya sebatas pemenuhan anggaran pemerintah akan tetapi juga menjadi landasan dalam menyetabilkan kondisi perekonomian dengan mengurangi angka inflasi yang terus melonjak naik (Siswajanthi et al., 2024).

Adapun pengelolaan pendapatan negara selain dari pendapatan melewati pajak, pemerintahan di era revolusi juga menekankan dalam pengaturan penempatan anggaran dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan-bahan yang pokok. Dimasa era revolusi, angka inflasi menjadi ancaman utama bagi pemerintahan karena angka inflasi dapat mengurangi daya beli di kalangan masyarakat, karena dampak yang diberikan oleh inflasi dapat menaikkan harga kebutuhan pokok yang tergolong tinggi dan mengakibatkan kesulitan di kalangan masyarakat. Dalam mengatasi hal ini, pemerintahan di era revolusi meletakkan sebagian besar pendapatan negara dalam mengamankan ketersediaan kebutuhan akan bahan pokok serta mencegah adanya spekulasi-spekulasi harga yang semakin melonjak naik(Siswajanthi et al., 2024).

Salahsatu upaya yang diambil pemerintahan pada masa itu, ialah dengan mendistribusikan barang-barang yang masuk kategori pokok seperti minyak, beras, dan gula. Serta pemerintahan mengupayakan atas pengendalian harga-harga barang pokok tidak terus melonjak naik yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial yang lebih parah. Penempatan anggaran dalam sektor kebutuhan dan ketahanan pangan menjadi hal yang penting dalam menjaga ketahanan di kalangan masyarakat dan sosial ekonomi negara di tengah-tengah ancaman angka inflasi yang kian meninggi (Cahyasari, 2018).

Adapun tantangan dalam pengimplementasi kebijakan fiskal pada era revolusi tdaklah gampang, karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam aspek administrasi yang masih tergolong kurang masif untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kemampuan pemerintah untuk pengelolaan sumber pendapatan, hal ini menjadi tantangan yang tergolong besar untuk mencapai stabilitas perekonomian. Adapun

adanya pembatasan terkait dengan aliran barang serta jasa yang diakibatkan oleh Belanda yang memblokir perekonomian juga berdampak terhadap efektivitas kebijakan fiskal yang berlaku di era revolusi (Cahyasari, 2018). Walaupun demikian, pengimplementasian kebijakan fiskal yang seimbang di tahun 1949 memberikan pelajaran fundamental yang penting terhadap pengelolaan finansial negara Indonesia. Sistem anggaran yang sangat ketat serta proses dalam mencapai kondisi ideal dalam pendapatan pajak menjadi prioritas dalam upaya mencapai stabilitas perekonomian di tengah goncangan ketidakpastian setelah kemerdekaan.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal yang diterapkan selama revolusi 1949 memegang peranan penting dalam usaha untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. Dengan mengutamakan prinsip anggaran seimbang, pemerintah berusaha untuk mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan inflasi tinggi yang muncul akibat Perang Kemerdekaan. Meningkatkan pendapatan pemerintah, terutama melalui perubahan perpajakan, merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pembiayaan pemerintah dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah seperti pengaturan distribusi barang dan penyaluran anggaran untuk kebutuhan dasar mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Walaupun ada beberapa tantangan seperti minimnya sumber daya administratif dan tekanan luar akibat blokade ekonomi, kebijakan moneter yang diimplementasikan menjadi dasar awal pengelolaan ekonomi modern di Indonesia. Pengalaman ini penting tidak hanya dalam konteks sejarah tetapi juga menawarkan pelajaran berharga untuk pengelolaan ekonomi ke depannya, terutama saat menghadapi situasi krisis. Menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang hati-hati adalah contoh nyata dari bagaimana tantangan dapat diatasi melalui perencanaan yang teliti dan prioritas yang jelas. Sumber daya yang terbatas bisa diperbaiki melalui pengelolaan keuangan yang strategis, sehingga menciptakan dasar untuk pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kebijakan fiskal tahun 1949 menjadi titik penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia setelah merdeka.

Daftar Pustaka

- Cahyasari, W. F. (2018). *Reformasi Undang-Undang Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>
- Kurniawan, M. A., Sari, D. N., & Fauziah, N. (2024). Tinjauan terhadap kebijakan Ekonomi Tiongkok sebagai pemuncak global: analisis perbandingan dengan Amerika Serikat. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 3(1), 30-38. <http://repository.uin-malang.ac.id/18218/>
- Miko, J., Arafah, S., & Hariani, F. (2024). Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Membangun Kesadaran Generasi Milenial Di Era Revolusi Industri 5.0. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 58-65.

- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnak Hukum POSITUM*, 6(2), 168–178.
- Riani, N. (2024). Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional. *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 4(2), 1-8.
- Siswajanthi, F., Aliyah Shiva, K., Salsabila, N., Afifany Susanta Putry, S., Maharani Iskandar Putri, S., Studi Ilmu Hukum, P., & Pakuan Bogor, U. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia*, 8, 5–8.